

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdoerraef, 1986, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan, Cetakan 11*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Damanhuri HR, H.A., 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Kedudukan Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cetakan 11, Bulan Bintang, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum, Ed.1. Cet 1*. CV Ganda, Yogyakarta.
- Jafizham.T, 2006, *persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, PT. Mestika, Jakarta.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abdul Ela, 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Tiga Serangkai, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 2001, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, A., 1970, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, PT. Intermasa, Jakarta.
- Ruslan, Rosady, 2004, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Ed. 1. Cet.2, PT Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J., *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Soetojo R., Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, mandar Maju, Surabaya.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman, H. Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tamakiran S, 1992, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 No. 23 tentang *Burgelijk Wetboek vor Indonesie (BW)*).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Termasuk Dalam Lembara-Negara Tahun 1963 Nomor 61).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914).

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5793).

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2013 Tentang Badan pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155).

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Kompilasi Hukum Islam ;

Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Denpasar tanggal 10 Desember 2014  
Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Dps.

### **C. TESIS**

I Wayan Mudita, 2014, Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Pio Basuki, 2015, Tinjauan Tentang Kepemilikan Tanah Dengan Status Hak Milik Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Campuran, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

I Nyoman Sumardika, 2007 Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Kabupaten Badung, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.